**Budaya Politik dalam Komunikasi Politik di Indonesia**

**Amiruddin Setiawan**

*amiruddinsetiawan@gmail.com*

**Dosen Tetap Prodi S1 Administrasi Negara**

**Universitas Majalengka**

***Abstract***

*Culture emerges and evolves according to human development and progress in trying to find the problems faced in life. Culture was born as a reflection of human thinking that began to develop and step by step forward with a certain and convincing. It is undeniable that today's advancement is due to a human culture that is beginning to advance and discovering the many technologies that human beings need at that time and now.*

*In its development, culture can be a determinant and an appraiser of the characteristic of a society. The development of human thinking progress has changed the way of culture in society including custom and normative culture which is owned by a society one of them is culture in politics.*

*Political culture in Indonesia is very strong with the culture of democracy built by the heritage of the ancestors has been to simulate the way of thinking of our society in addressing the existing politics. But the number of notions (ismeisms) entered and introduced by future generations has changed the way in which they perceive the current political culture. This resulted in many political cultures that are simple, practical and tend to be hegemonic.*

*Currently, the political culture in Indonesia is experiencing various changes and the perspective of a diverse society. The political culture of money politics and patronage culture and is now a trendsetter of practical political culture that politicians do to gain power and influence in society.*

*Keywords: cultural emergence, cultural perspective, political culture*

***Abstraks***

Budaya muncul dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan manusia dalam mencoba menemukan masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Budaya lahir sebagai refleksi dari cara berpikir manusia yang mulai berkembang dan maju step by step secara pasti dan menyakinkan. Tidak dipungkiri kemajuan yang ada saat ini dikarenakan budaya manusia yang mulai maju dan menemukan banyak teknologi yang dibutuhkan manusia pada saat itu dan sekarang.

Dalam perkembangannya, budaya bisa menjadi penentu dan penilai dari ciri khas suatu masyarakat. Perkembangan kemajuan berpikir manusia telah mengubah tata cara berbudaya di masyarakat termasuk adat istiadat dan budaya normative yang di miliki oleh suatu masyarakat salah satunya adalah budaya dalam berpolitik.

Budaya politik di Indonesia sangat kental dengan budaya demokrasi yang dibangun oleh warisan leluhur telah mendonimasi cara berpikir masyarakat kita dalam menyikapi politik yang ada. Tapi banyaknya paham (isme-isme) yang masuk dan dikenalkan oleh generasi penerus telah mengubah cara pandang dalam memahami budaya politik yang ada saat ini. Hal ini mengakibatkan banyaknya budaya berpolitik yang simple, praktis dan cenderung hegemonis.

Saat ini budaya politik di Indonesia mengalami berbagai perubahan paham dan cara pandang masyarakat yang beraneka ragam. Budaya politik money politics maupun budaya patronage dan saat ini menjadi trendsetter budaya politik praktis yang dilakukan kaum politisi untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh di dalam masyarakat.

*Kata kunci : kemunculan budaya, perspektif budaya, budaya politik*

1. **Pendahuluan**

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan pernah bisa tidak berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia lainnya. Manusia senantiasa akan selalu berinteraksi dengan yang lainnya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui proses interaksi dan komunikasi tersebut, kemudian akan melahirkan budaya dalam kehidupan masyarakat. Suatu budaya yang diterapkan dalam kehidupan suatu sistem sosial akan mempengaruhi sistem komunikasinya pula.

Budaya adalah hasil dari proses komunikasi yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Dalam berkomunikasi, budaya sangat mempengaruhinya baik secara pola, jenis ataupun konteks. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu sistem sosial yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia.

 Saat ini budaya politik di Indonesia mengalami berbagai perubahan paham dan cara pandang masyarakat yang beraneka ragam. Budaya politik money politics maupun budaya patronage dan saat ini menjadi trendsetter budaya politik praktis yang dilakukan kaum politisi untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh di dalam masyarakat.

1. **Kajian Teoritis** \

**Politik dan Budaya Politik**

Banyak definisi tentang politik, tidak ada yang absolud dalam mendefinisikan tentang politik. Menurut Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr. (dalam Arifin, 2003:12), budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi. Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitenya.

Budaya politik merupakan cerminan sikap khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, serta sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem politik itu. Bisa dikatakan budaya politik merupakan orientasi psikologis terhadap objek sosial—sistem politik—yang kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang bersifat kognitif (pemahaman dan keyakinan), afektif (ikatan emosional/perasaan) dan evaluatif (penilaian). Budaya politik merupakan cerminan sikap khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, serta sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem politik itu. Bisa dikatakan budaya politik merupakan orientasi psikologis terhadap objek sosial—sistem politik—yang kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang bersifat kognitif (pemahaman dan keyakinan), afektif (ikatan emosional/perasaan) dan evaluatif (penilaian).

Para ilmuwan sosial mengakui bahwa budaya dan komunikasi itu mempunyai hubungan timbal balik, seperti dua sisi dari satu mata uang. Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi kemudia komunikasi juga ikut menentukan, memelihara, mengembangkan atau mewariskan budaya. Ini berlaku juga pada budaya politik yang berpengaruh kuat terhadap komunikasi politik di Indonesia. Jika budaya politik Indonesia A maka komunikasi politik yang terjadi pun akan A.

Sistem politik demokratis yang dijalankan Indonesia saat in masih belum seiring dengan kebudayaan politik yang ada di dalamnya. Idealnya, negara yang demokratis bisa didapatkan jika budaya politik masyarakat yang partisipan. Namun, kembali pada budaya politik yang terdapat di Indonesia―parokial dan kaula―belum bisa mewujudkan sistem yang demokrasi. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya, kalangan pemerintah dan elite politik harus mengambil langkah-langkah strategis demi mewujudkan budaya politik partisipan (demokrasi). Ini dilakukan untuk mendukung terbentuknya sebuah sistem politik yang demokratis. Kepentingan dan aspirasi rakyat harus menjadi pusat perhatian dalam pengambilan kebijakan.

**Definisi Budaya Politik**

Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitenya. Seperti juga di Indonesia, menurut Benedict R. O'G Anderson, kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengan kelompok massa.

Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu. Lebih jauh mereka menyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.

Berikut ini adalah beberapa pengertian budaya politik yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk lebih memahami secara teoritis sebagai berikut :

1. Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberikan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.
2. Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Yang pertama menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme. Yang kedua (aspek generik) menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka, atau tertutup.
3. Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan.
4. Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat. Pola kepemimpinan (konformitas atau mendorong inisiatif kebebasan), sikap terhadap mobilitas (mempertahankan status quo atau mendorong mobilitas), prioritas kebijakan (menekankan ekonomi atau politik).

Dengan pengertian budaya politik di atas, nampaknya membawa kita pada suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu. Dengan orientasi yang bersifat individual ini, tidaklah berarti bahwa dalam memandang sistem politiknya kita menganggap masyarakat akan cenderung bergerak ke arah individualisme. Jauh dari anggapan yang demikian, pandangan ini melihat aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai pengakuan akan adanya fenomena dalam masyarakat secara keseluruhan tidak dapat melepaskan diri dari orientasi individual.

Budaya politik mengandung 3 (tiga) komponen obyek politik sebagai berikut :

1. *Orientasi kognitif* yaitu berupa pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya.
2. *Orientasi afektif* yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan pe-nampilannya.
3. *Orientasi evaluatif* yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

**Tipe-tipe Budaya Politik**

Berdasarkan Orientasi Politiknya, budaya politik di bagi menjadi beberapa macam diantaranya :

* 1. Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat dapat di katakan Parokial apabila frekuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman di Indonesia. dalam masyarakat ini tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Kepala suku, kepala kampung, kyai, atau dukun,yang biasanya merangkum semua peran yang ada, baik peran yang bersifat politis, ekonomis atau religius.
	2. Budaya politik kaula (subjek), yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan subyek jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Namun frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah dan secara efektif mereka di arahkan pada otoritas tersebut. Sikap masyarakat terhadap sistem politik yang ada ditunjukkan melalui rasa bangga atau malah rasa tidak suka. Intinya, dalam kebudayaan politik subyek, sudah ada pengetahuan yang memadai tentang sistem politik secara umum serta proses penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah.
	3. Budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Dan juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung. Masyarakat cenderung di arahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak.

Dalam kehidupan masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa terbentuknya budaya politik merupakan gabungan dari ketiga klasifikasi tersebut di atas. Tentang klasifikasi budaya politik di dalam masyarakat lebih lanjut dibahas sebagai berikut:

* + 1. Budaya politik Parokial

Dalam budaya politik Parokial ini memiliki ciri – ciri sebagai berikut :

1. Frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek *input*, obyek-obyek *output*, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati nol.
2. Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam masyarakat.
3. Orientasi parokial menyatakan alpanya harapan-harapan akan perubahan yang komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik
4. Kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik.
5. Parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana dimana spesialisasi politik berada pada jenjang sangat minim
6. Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif dari pada kognitif
	* 1. Budaya Politik Subjek/ Kaula

Dalam budaya politik sistem Subjek/ Kaula ini memiliki cirikhas diantaranya :

1. Terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan aspek output dari sistem itu, tetapi frekuensi orientasi terhadap obyek-obyek input secara khusus, dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif mendekati nol.
2. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah
3. Hubungannya terhadap sistem plitik secara umum, dan terhadap output, administratif secara esensial merupakan hubungan yang pasif.
4. Sering wujud di dalam masyarakat di mana tidak terdapat struktur *input* yang terdiferensiansikan.
5. Orientasi subyek lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif.
	* 1. Budaya politik Partisipan

Dalam budaya politik Partisipan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Frekuensi orientasi politik sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek *input*, *output*, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati satu.
2. Bentuk kultur dimana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem politik secara komprehensif dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif (aspek *input* dan *output* sistem politik)
3. Anggota masyarakat partisipatif terhadap obyek politik
4. Masyarakat berperan sebagai aktivis.

Namun dalam kenyataan tidak ada satupun negara yang memiliki budaya politik murni partisipan, pariokal atau subyek melainkan terdapat variasi campuran di antara ketiga tipe-tipe tersebut. Menurut Almond dan Verba ketiga macam budaya politik tersebut sudah mengalami perubahan metode dan cara praktek di lapangan yang menjadi budaya campuran atau budaya kompleksitas. Munculnya budaya kompleksitas ini telah melahirkan teori maupun paham baru dalam budaya politik seperti :

a. Budaya politik subyek-parokial (the parochial- subject culture)

b. Budaya politik subyek-partisipan (the subject-participant culture)

c. Budaya politik parokial-partisipan (the parochial-participant culture)

* ***Berdasarkan Sikap Yang Ditunjukkan***

Pada negara yang memiliki sistem ekonomi dan teknologi yang kompleks, menuntut kerja sama yang luas untuk memperpadukan modal dan keterampilan. Jiwa kerja sama dapat diukur dari sikap orang terhadap orang lain. Pada kondisi ini budaya politik memiliki kecenderungan sikap ”militan” atau sifat ”tolerasi”.

a. Budaya Politik Militan

 Budaya politik dimana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi kriris, maka yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah, dan masalah yang mempribadi selalu sensitif dan membakar emosi.

b. Budaya Politik Toleransi

 Budaya politik dimana pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar yang mana selalu membuka pintu untuk bekerja sama. Sikap netral atau kritis terhadap ide orang, tetapi bukan curiga terhadap orang.

Jika pernyataan umum dari pimpinan masyarakat bernada sangat militan, maka hal itu dapat menciptakan ketegangan dan menumbuhkan konflik. Kesemuanya itu menutup jalan bagi pertumbuhan kerja sama. Pernyataan dengan jiwa tolerasi hampir selalu mengundang kerja sama.

* ***Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan, Budaya Politik terbagi atas :***
1. Budaya politik yang memiliki sikap mental absolut

 Budaya politik yang mempunyai sikap mental yang absolut memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang. dianggap selalu sempurna dan tak dapat diubah lagi. Usaha yang diperlukan adalah intensifikasi dari kepercayaan, bukan kebaikan. Pola pikir demikian hanya memberikan perhatian pada apa yang selaras dengan mentalnya dan menolak atau menyerang hal-hal yang baru atau yang berlainan (bertentangan). Budaya politik yang bernada absolut bisa tumbuh dari tradisi, jarang bersifat kritis terhadap tradisi, malah hanya berusaha memelihara kemurnian tradisi. Maka, tradisi selalu dipertahankan dengan segala kebaikan dan keburukan. Kesetiaan yang absolut terhadap tradisi tidak memungkinkan pertumbuhan unsur baru.

1. Budaya politik yang memiliki sikap mental akomodatif

 Struktur mental yang bersifat akomodatif biasanya terbuka dan sedia menerima apa saja yang dianggap berharga. Ia dapat melepaskan ikatan tradisi, kritis terhadap diri sendiri, dan bersedia menilai kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini.

Tipe absolut dari budaya politik sering menganggap perubahan sebagai suatu yang membahayakan. Tiap perkembangan baru dianggap sebagai suatu tantangan yang berbahaya yang harus dikendalikan. Perubahan dianggap sebagai penyim¬pangan. Tipe akomodatif dari budaya politik melihat perubahan hanya sebagai salah satu masalah untuk dipikirkan. Perubahan mendorong usaha perbaikan dan pemecahan yang lebih sempurna.

**Budaya Politik Indonesia**

Budaya politik adalah kebiasaan berpolitik. Negara kita ini adalah negeri yang menganut paham Demokrasi. Yang dimana dalam prakteknya semua hal harus dibicarakan bersama dan mencapai kesepakatan yang mufakat, contohnya pemilu yang merupakan Budaya politik di Indonesia. Indonesia memiliki kepala negara yaitu presiden, tetapi kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dikembalikan lagi untuk rakyat.

Indonesia harus melewati 4 tahap dalam mencapai kemerdekaanya, tahapan-tahapan itu sebagai berikut :

1. Angkatan Perintis ( 1908 )

Dalam angkatan perintis ini, Indonesia masih bersifat kedaerahan. Angkatan ini dimulai dari berdirinya organisasi budi utomo yang diketahui oleh sutomo, yang merupakan pelopor dari berdirinya organisasi-organisasi daerah.

1. Angkatan Penegas (1928 )

Dalam angkatan penegas ini, Indonesia telah bersifat Nasional atau kebangsaan yang dipelopori oleh patih gajah mada. Yang teklah mempersatukan organisasi-organisasi di daerah-daerah untuk bersatu dan menjadi organisasi nasional dengan dipersatukan melalui semboyan Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu jua.

1. Angkatan Pendobrak ( 1945 )

Pada angkatan pendobrak ini Indonesia Merdeka. Dan otomatis perubahan status indonesia yang awalnya berbentuk kebangsaan menjadi kenegaraan.

Gambaran sementara tentang budaya politik Indonesia, yang tentunya harus di telaah dan dibuktikan lebih lanjut oleh pengamatan tentang variabel sebagai berikut :

1. Konfigurasi subkultur di Indonesia masih aneka ragam, walaupun tidak sekompleks yang dihadapi oleh India misalnya, yang menghadapi masalah perbedaan bahasa, agama, kelas, kasta yang semuanya relatif masih rawan/rentan.
2. Budaya politik Indonesia yang bersifat Parokial-Kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak, di satu segi masa masih ketinggalan dalam mempergunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya yang mungkin di sebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan ikatan primordial.
3. Sikap ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang di kenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukaan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu; purutanisme dan non puritanisme dan lain-lain.
4. kecendrungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap paternalisme dan sifat patrimonial; sebagai indikatornya dapat di sebutkan antara lain bapakisme, sikap asal bapak senang.
5. Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat.

Adapun budaya politik di Indonesia terbagi atas :

1. ***Hierarki yang Tegar/Ketat***

Contoh nyata dari adanya hirarki yang tegar/ketat pada budaya politik Indonesia adalah Masyarakat Jawa yang pada dasarnya bersifat hierarkis. Stratifikasi sosial yang hirarkis ini tampak dari adanya pemilahan tegas antara penguasa (wong gedhe) dengan rakyat kebanyakan (wong cilik). Masing-masing terpisah melalui tatanan hirarkis yang sangat ketat. Alam pikiran dan tatacara sopan santun diekspresikan sedemikian rupa sesuai dengan asal-usul kelas masing-masing. Penguasa dapat menggunakan bahasa 'kasar' kepada rakyat kebanyakan. Sebaliknya, rakyat harus mengekspresikan diri kepada penguasa dalam bahasa 'halus'. Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial semacam itu antara lain tercemin pada cara penguasa memandang diri dan rakyatnya.

1. ***Kecendrungan Patronage***

Pola hubungan Patronage merupakan salah satu budaya politik yang menonjol di Indonesia. Pola hubungan ini bersifat individual. Dalam kehidupan politik, tumbuhnya budaya politik semacam ini tampak misalnya di kalangan pelaku politik. Mereka lebih memilih mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungan dari basisnya.

1. ***Kecendrungan Neo-patrimonialistik***

Salah satu kecendrungan dalam kehidupan politik di Indonesia adalah adanya kecendrungan munculnya budaya politik yang bersifat *neo-patrimonialistik*; artinya meskipun memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik seperti birokrasi, perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial. Hal ini digambarkan oleh Nimmo (2007) bahwa kecenderungan politik di Indonesia yang cenderung modern dan rasionalistik tetapi masih menempatkan tradisi dan budaya asli Indonesia yang ada. Jika kita lihat kecenderungan budaya politik Indonesia yang modern dan neo-patrimonialistik ini bisa dilihat cirri – cirri yang ada dalam birokrasi modern seperti :

1. Adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi
2. Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tegas.
3. Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi, dan standar-standar formalyang mengatur bekerjanya organisasi dan tingkah laku anggotanya
4. Adanya personil yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan atas dasar karier, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan.
5. **Simpulan**

Jika dilihat dari uraian dan gambaran diatas, maka kecenderungan budaya poliitk masyarakat Indonesia saat ini lebih kental dengan paham neo-patrimonialistik. Diakui maupun tidaknya, kecenderungan budaya politik kita lebih banyak mengadopsi dari paham dan budaya politik dari luar yang dikatakan lebih modern dan maju. Hal inilah yang menjadi inti perubahan budaya politik masyarakat kita dalam memahami dan menerapkan dalam sistem pemerintahan kita saat ini.

**Daftar Pustaka**

Arifin, Anwar. 2003. *Komunikasi Politik, Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi Komunikasi Komunikasi Politik Indonesia.* Balai Pustaka. Jakarta

Nimmo, Dan. 2006. *Komunikasi Politik : Khalayak dan Efek.* Rosdakarya. Bandung

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2007. Komunikasi Politik : Komunikator, Pesan dan Media. Rosda Karya. Bandung

**Sumber-sumber lain :**

http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya\_politik

<http://indonesia-liek.blogspot.com>

http://cumut.wordpress.com

http://mjieschool.multiply.com